



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
No.944, 2014

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 139/PMK.03/2014**

**TENTANG  
KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI  
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. bahwa dengan dialihkannya kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan ke pemerintah daerah sesuai Pasal 2 dan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Direktorat Jenderal Pajak hanya mengelola Pajak Bumi dan Bangunan selain Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi Wajib Pajak, dan stabilitas dalam penentuan objek pajak dan Nilai Jual Objek Pajak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tersebut pada huruf a;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau pennebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
6. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
7. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
8. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
10. Wilayah Izin Pertambangan adalah wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan untuk kegiatan usaha pertambangan yang meliputi WIUP, WIUPK, atau WPR.
11. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
12. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WIUP.
13. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WIUPK.
14. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai

perolehan baru, atau NJOP pengganti.

16. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

#### Pasal 2

- (1) Objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi objek pajak:
  - a. sektor perkebunan;
  - b. sektor perhutanan;
  - c. sektor pertambangan; dan
  - d. sektor lainnya.

#### Pasal 3

- (1) Objek pajak sektor perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.
- (2) Kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), dan
  - b. usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan.
- (3) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha; dan
  - b. wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.
- (4) Wilayah yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang hak guna usahanya sedang dalam proses perpanjangan; dan
  - b. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang hak guna usahanya

wajib diselesaikan.

#### Pasal 4

- (1) Objek pajak sektor perhutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah Bumi dan/atau Bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan.
- (2) Kegiatan usaha perhutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan usaha perhutanan yang diberikan:
  - a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
  - b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
  - c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
  - d. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
  - e. Hak Pengusahaan Hutan;
  - f. Hak Pemungutan Hasil Hutan;
  - g. Izin lainnya yang sah, antara lain berupa penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi.
- (3) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. wilayah di luar wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan.

#### Pasal 5

- (1) Objek Pajak sektor pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah Bumi dan/atau Bangunan, yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan usaha pertambangan untuk:
  - a. pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama atau bentuk kontrak kerja sama lainnya yang sah;
  - b. pertambangan panas bumi yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi yang diberikan izin usaha pertambangan panas bumi; dan
  - c. pertambangan mineral dan batubara yang meliputi kegiatan eksplorasi dan operasi produksi yang diberikan IUP, IUPK, IPR,

atau izin lainnya yang sejenis.

- (3) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Wilayah Kerja, Wilayah Izin Pertambangan, atau wilayah sejenisnya; dan
  - b. wilayah di luar Wilayah Kerja, Wilayah Izin Pertambangan, atau wilayah sejenisnya yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan.

#### Pasal 6

Objek pajak sektor lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan, selain objek pajak sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor pertambangan yang tidak berada dalam wilayah kabupaten/kota.

#### Pasal 7

- (1) Klasifikasi NJOP Bumi dan klasifikasi NJOP Bangunan untuk objek pajak sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal nilai jual Bumi dan nilai jual Bangunan untuk objek pajak sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai jual Bumi dan nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

#### Pasal 8

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOP, setiap tahun untuk masing-masing:

- a. kabupaten/kota;
- b. wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam satu kabupaten/kota; atau
- c. wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk.

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara penetapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini penetapan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang untuk tahun pajak 2013 dan tahun-tahun pajak sebelumnya dilakukan dengan menggunakan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada  
tanggal 10 Juli 2014

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

=====

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 139/PMK.03/2014  
TENTANG  
KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL  
OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERKEBUNAN, OBJEK PAJAK SEKTOR PERHUTANAN, OBJEK PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN, DAN OBJEK PAJAK SEKTOR LAINNYA.

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )
------	---	--

001	> 3.064.000,00 s/d 3.136.000,00	3.100.000,00
002	> 3.010.000,00 s/d 3.064.000,00	3.037.000,00
003	> 2.948.000,00 s/d 3.010.000,00	2.979.000,00
004	> 2.902.000,00 s/d 2.948.000,00	2.925.000,00
005	> 2.850.000,00 s/d 2.902.000,00	2.876.000,00
006	> 2.804.000,00 s/d 2.850.000,00	2.827.000,00
007	> 2.754.000,00 s/d 2.804.000,00	2.779.000,00
008	> 2.710.000,00 s/d 2.754.000,00	2.732.000,00
009	> 2.662.000,00 s/d 2.710.000,00	2.686.000,00
010	> 2.618.000,00 s/d 2.662.000,00	2.640.000,00
011	> 2.574.000,00 s/d 2.618.000,00	2.596.000,00
012	> 2.530.000,00 s/d 2.574.000,00	2.552.000,00
013	> 2.486.000,00 s/d 2.530.000,00	2.508.000,00
014	> 2.426.000,00 s/d 2.486.000,00	2.456.000,00
015	> 2.382.000,00 s/d 2.426.000,00	2.404.000,00
016	> 2.324.000,00 s/d 2.382.000,00	2.353.000,00
017	> 2.260.000,00 s/d 2.324.000,00	2.292.000,00
018	> 2.206.000,00 s/d 2.260.000,00	2.233.000,00
019	> 2.146.000,00 s/d 2.206.000,00	2.176.000,00
020	> 2.094.000,00 s/d 2.146.000,00	2.120.000,00
021	> 2.038.000,00 s/d 2.094.000,00	2.066.000,00
022	> 1.988.000,00 s/d 2.038.000,00	2.013.000,00
023	> 1.936.000,00 s/d 1.988.000,00	1.962.000,00



024	> 1.888.000,00 s/d 1.936.000,00	1.912.000,00
025	> 1.836.000,00 s/d 1.888.000,00	1.862.000,00
026	> 1.794.000,00 s/d 1.836.000,00	1.815.000,00
027	> 1.742.000,00 s/d 1.794.000,00	1.768.000,00
028	> 1.702.000,00 s/d 1.742.000,00	1.722.000,00
029	> 1.642.000,00 s/d 1.702.000,00	1.672.000,00
030	> 1.602.000,00 s/d 1.642.000,00	1.622.000,00
031	> 1.544.000,00 s/d 1.602.000,00	1.573.000,00
032	> 1.496.000,00 s/d 1.544.000,00	1.520.000,00
033	> 1.438.000,00 s/d 1.496.000,00	1.467.000,00
034	> 1.394.000,00 s/d 1.438.000,00	1.416.000,00
035	> 1.340.000,00 s/d 1.394.000,00	1.367.000,00
036	> 1.300.000,00 s/d 1.340.000,00	1.320.000,00
037	> 1.248.000,00 s/d 1.300.000,00	1.274.000,00
038	> 1.214.000,00 s/d 1.248.000,00	1.231.000,00
039	> 1.164.000,00 s/d 1.214.000,00	1.189.000,00
040	> 1.130.000,00 s/d 1.164.000,00	1.147.000,00
041	> 1.080.000,00 s/d 1.130.000,00	1.105.000,00
042	> 1.050.000,00 s/d 1.080.000,00	1.065.000,00
043	> 1.004.000,00 s/d 1.050.000,00	1.027.000,00
044	> 968.000,00 s/d 1.004.000,00	986.000,00
045	> 930.000,00 s/d 968.000,00	949.000,00

046	> 902.000,00 s/d 930.000,00	916.000,00
047	> 870.000,00 s/d 902.000,00	886.000,00
048	> 844.000,00 s/d 870.000,00	857.000,00
049	> 814.000,00 s/d 844.000,00	829.000,00
050	> 790.000,00 s/d 814.000,00	802.000,00
051	> 762.000,00 s/d 790.000,00	776.000,00
052	> 740.000,00 s/d 762.000,00	751.000,00
053	> 714.000,00 s/d 740.000,00	727.000,00
054	> 692.000,00 s/d 714.000,00	703.000,00
055	> 668.000,00 s/d 692.000,00	680.000,00
056	> 646.000,00 s/d 668.000,00	657.000,00
057	> 624.000,00 s/d 646.000,00	635.000,00
058	> 604.000,00 s/d 624.000,00	614.000,00
059	> 584.000,00 s/d 604.000,00	594.000,00
060	> 566.000,00 s/d 584.000,00	575.000,00
061	> 546.000,00 s/d 566.000,00	556.000,00
062	> 528.000,00 s/d 546.000,00	537.000,00
063	> 508.000,00 s/d 528.000,00	518.000,00
064	> 492.000,00 s/d 508.000,00	500.000,00

065	> 472.000,00 s/d 492.000,00	482.000,00
066	> 456.000,00 s/d 472.000,00	464.000,00
067	> 434.000,00 s/d 456.000,00	445.000,00
068	> 420.000,00 s/d 434.000,00	427.000,00

069	> 400.000,00 s/d 420.000,00	410.000,00
070	> 388.000,00 s/d 400.000,00	394.000,00
071	> 368.000,00 s/d 388.000,00	378.000,00
072	> 358.000,00 s/d 368.000,00	363.000,00
073	> 340.000,00 s/d 358.000,00	349.000,00
074	> 330.000,00 s/d 340.000,00	335.000,00
075	> 314.000,00 s/d 330.000,00	322.000,00
076	> 304.000,00 s/d 314.000,00	309.000,00
077	> 290.000,00 s/d 304.000 ,00	297.000,00
078	> 280.000,00 s/d 290.000,00	285.000,00
079	> 268.000,00 s/d 280.000,00	274.000,00
080	> 258.000,00 s/d 268.000,00	263.000,00
081	> 248.000,00 s/d 258.000,00	253.000,00
082	> 237.000,00 s/d 248.000,00	243.000,00
083	> 227.000,00 s/d 237.000,00	232.000,00
084	> 215.000,00 s/d 227.000,00	221.000,00
085	> 205.000,00 s/d 215.000,00	210.000,00
086	> 195.000,00 s/d 205.000,00	200.000,00
087	> 184.000,00 s/d 195.000,00	190.000,00
088	> 176.000,00 s/d 184.000,00	180.000,00

089	> 164.000,00 s/d 176.000,00	170.000,00
090	> 156.000,00 s/d 164.000,00	160.000,00

091	> 146.000,00 s/d 156.000,00	151.000,00
092	> 139.000,00 s/d 146.000,00	143.000,00
093	> 131.000,00 s/d 139.000,00	135.000,00
094	> 124.000,00 s/d 131.000,00	128.000,00
095	> 120.000,00 s/d 124.000,00	122.000,00
096	> 114.000,00 s/d 120.000,00	117.000,00
097	> 110.000,00 s/d 114.000,00	112.000,00
098	> 105.000,00 s/d 110.000,00	107.500,00
099	> 100.900,00 s/d 105.000,00	103.000,00
100	> 96.300,00 s/d 100.900,00	98.600,00
101	> 92.300,00 s/d 96.300,00	94.300,00
102	> 87.900,00 s/d 92.300,00	90.100,00
103	> 84.100,00 s/d 87.900,00	86.000,00
104	> 79.900,00 s/d 84.100,00	82.000,00
105	> 76.100,00 s/d 79.900,00	78.000,00
106	> 72.300,00 s/d 76.100,00	74.200,00
107	> 68.900,00 s/d 72.300,00	70.600,00
108	> 65.500,00 s/d 68.900,00	67.200,00
109	> 62.500,00 s/d 65.500,00	64.000,00
110	> 59.500,00 s/d 62.500,00	61.000,00
111	> 56.700,00 s/d 59.500,00	58.100,00
112	> 54.100,00 s/d 56.700,00	55.400,00
113	> 51.500,00 s/d 54.100,00	52.800,00

114	> 49.100,00 s/d 51.500,00	50.300,00
115	> 46.900,00 s/d 49.100,00	48.000,00
116	> 44.700,00 s/d 46.900,00	45.800,00
117	> 42.700,00 s/d 44.700,00	43.700,00
118	> 40.700,00 s/d 42.700,00	41.700,00
119	> 38.700,00 s/d 40.700,00	39.700,00
120	> 36.900,00 s/d 38.700,00	37.800,00
121	> 35.100,00 s/d 36.900,00	36.000,00
122	> 33.500,00 s/d 35.100,00	34.300,00
123	> 32.100,00 s/d 33.500,00	32.800,00
124	> 30.500,00 s/d 32.100,00	31.300,00
125	> 29.100,00 s/d 30.500,00	29.800,00
126	> 27.700,00 s/d 29.100,00	28.400,00
127	> 26.300,00 s/d 27.700,00	27.000,00
128	> 24.900,00 s/d 26.300,00	25.600,00
129	> 23.700,00 s/d 24.900,00	24.300,00
130	> 22.500,00 s/d 23.700,00	23.100,00
131	> 21.500,00 s/d 22.500,00	22.000,00
132	> 20.500,00 s/d 21.500,00	21.000,00
133	> 19.500,00 s/d 20.500,00	20.000,00
134	> 18.500,00 s/d 19.500,00	19.000,00
135	> 17.600,00 s/d 18.500,00	18.100,00

136	> 16.800,00 s/d 17.600,00	17.200,00
137	> 16.000,00 s/d 16.800,00	16.400,00
138	> 15.200,00 s/d 16.000,00	15.600,00
139	> 14.400,00 s/d 15.200,00	14.800,00
140	> 13.600,00 s/d 14.400,00	14.000,00
141	> 13.000,00 s/d 13.600,00	13.300,00
142	> 12.400,00 s/d 13.000,00	12.700,00
143	> 11.800,00 s/d 12.400,00	12.100,00
144	> 11.200,00 s/d 11.800,00	11.500,00
145	> 10.700,00 s/d 11.200,00	11.000,00
146	> 10.200,00 s/d 10.700,00	10.500,00
147	> 9.700,00 s/d 10.200,00	10.000,00
148	> 9.300,00 s/d 9.700,00	9.500,00
149	> 8.900,00 s/d 9.300,00	9.100,00
150	> 8.500,00 s/d 8.900,00	8.700,00
151	> 8.100,00 s/d 8.500,00	8.300,00
152	> 7.700,00 s/d 8.100,00	7.900,00
153	> 7.300,00 s/d 7.700,00	7.500,00
154	> 7.000,00 s/d 7.300,00	7.150,00
155	> 6.600,00 s/d 7.000,00	6.800,00
156	> 6.300,00 s/d 6.600,00	6.450,00
157	> 5.900,00 s/d 6.300,00	6.100,00
158	> 5.600,00 s/d 5.900,00	5.750,00

159	> 5.400,00 s/d 5.600,00	5.500,00
160	> 5.100,00 s/d 5.400,00	5.250,00

161	> 4.900,00 s/d 5.100,00	5.000,00
162	> 4.600,00 s/d 4.900,00	4.750,00
163	> 4.400,00 s/d 4.600,00	4.500,00
164	> 4.200,00 s/d 4.400,00	4.300,00
165	> 4.000,00 s/d 4.200,00	4.100,00
166	> 3.800,00 s/d 4.000,00	3.900,00
167	> 3.600,00 s/d 3.800,00	3.700,00
168	> 3.400,00 s/d 3.600,00	3.500,00
169	> 3.200,00 s/d 3.400,00	3.300,00
170	> 3.000,00 s/d 3.200,00	3.100,00
171	> 2.800,00 s/d 3.000,00	2.900,00
172	> 2.600,00 s/d 2.800,00	2.700,00
173	> 2.400,00 s/d 2.600,00	2.500,00
174	> 2.220,00 s/d 2.400,00	2.310,00
175	> 2.060,00 s/d 2.220,00	2.140,00
176	> 1.910,00 s/d 2.060,00	1.990,00
177	> 1.770,00 s/d 1.910,00	1.840,00
178	> 1.620,00 s/d 1.770,00	1.700,00
179	> 1.500,00 s/d 1.620,00	1.560,00
180	> 1.380,00 s/d 1.500,00	1.440,00

181	> 1.250,00 s/d 1.380,00	1.320,00
182	> 1.150,00 s/d 1.250,00	1.200,00
183	> 1.050,00 s/d 1.150,00	1.100,00
184	> 950,00 s/d 1.050,00	1.000,00
185	> 860,00 s/d 950,00	910
186	> 780,00 s/d 860,00	820
187	> 700,00 s/d 780,00	740
188	> 630,00 s/d 700,00	670
189	> 560,00 s/d 630,00	600
190	> 510,00 s/d 560,00	540
191	> 450,00 s/d 510,00	480
192	> 410,00 s/d 450,00	430
193	> 370,00 s/d 410,00	390
194	> 330,00 s/d 370,00	350
195	> 290,00 s/d 330,00	310
196	> 250,00 s/d 290,00	270
197	> 210,00 s/d 250,00	230
198	> 190,00 s/d 210,00	200
199	> 150,00 s/d 190,00	170
200	> 0 s/d 150,00	140

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERKEBUNAN, OBJEK PAJAK SEKTOR PERHUTANAN, OBJEK PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN, DAN OBJEK PAJAK SEKTOR LAINNYA



Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m <sup>2</sup> )	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m <sup>2</sup> )
001	> 15.800.000,00 s/d 16.100.000,00	16.000.000,00
002	> 15.434.000,00 s/d 15.800.000,00	15.600.000,00

003	> 15.066.000,00 s/d 15.434.000,00	15.250.000,00
004	> 14.688.000,00 s/d 15.066.000,00	14.800.000,00
005	> 14.330.000,00 s/d 14.688.000,00	14.500.000,00
006	> 13.970.000,00 s/d 14.330.000,00	14.150.000,00
007	> 13.612.000,00 s/d 13.970.000,00	13.800.000,00
008	> 13.246.000,00 s/d 13.612.000,00	13.430.000,00
009	> 12.904.000,00 s/d 13.246.000,00	13.075.000,00
010	> 12.538.000,00 s/d 12.904.000,00	12.720.000,00
011	> 12.213.000,00 s/d 12.538.000,00	12.380.000,00
012	> 11.887.000,00 s/d 12.213.000,00	12.050.000,00
013	> 11.562.000,00 s/d 11.887.000,00	11.725.000,00
014	> 11.229.000,00 s/d 11.562.000,00	11.395.000,00
015	> 10.921.000,00 s/d 11.229.000,00	11.075.000,00
016	> 10.612.000,00 s/d 10.921.000,00	10.770.000,00
017	> 10.296.000,00 s/d 10.612.000,00	10.450.000,00
018	> 10.004.000,00 s/d 10.296.000,00	10.150.000,00
019	> 9.688.000,00 s/d 10.004.000,00	9.850.000,00
020	> 9.413.000,00 s/d 9.688.000,00	9.550.000,00
021	> 9.137.000,00 s/d 9.413.000,00	9.275.000,00

022	> 8.862.000,00 s/d 9.137.000,00	9.000.000,00
023	> 8.579.000,00 s/d 8.862.000,00	8.720.000,00
024	> 8.321.000,00 s/d 8.579.000,00	8.450.000,00
025	> 8.063.000,00 s/d 8.321.000,00	8.190.000,00
026	> 7.796.000,00 s/d 8.063.000,00	7.930.000,00

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )
027	> 7.554.000,00 s/d 7.796.000,00	7.675.000,00
028	> 7.313.000,00 s/d 7.554.000,00	7.430.000,00
029	> 7.070.000,00 s/d 7.313.000,00	7.190.000,00
030	> 6.830.000,00 s/d 7.070.000,00	6.950.000,00
031	> 6.588.000,00 s/d 6.830.000,00	6.710.000,00
032	> 6.346.000,00 s/d 6.588.000,00	6.470.000,00
033	> 6.104.000,00 s/d 6.346.000,00	6.225.000,00
034	> 5.862.000,00 s/d 6.104.000,00	5.980.000,00
035	> 5.613.000,00 s/d 5.862.000,00	5.740.000,00
036	> 5.387.000,00 s/d 5.613.000,00	5.500.000,00
037	> 5.138.000,00 s/d 5.387.000,00	5.260.000,00
038	> 4.930.000,00 s/d 5.138.000,00	5.030.000,00
039	> 4.700.000,00 s/d 4.930.000,00	4.825.000,00
040	> 4.488.000,00 s/d 4.700.000,00	4.600.000,00
041	> 4.296.000,00 s/d 4.488.000,00	4.390.000,00

042	> 4.104.000,00 s/d 4.296.000,00	4.200.000,00
043	> 3.912.000,00 s/d 4.104.000,00	4.010.000,00
044	> 3.713.000,00 s/d 3.912.000,00	3.813.000,00
045	> 3.537.000,00 s/d 3.713.000,00	3.625.000,00
046	> 3.362.000,00 s/d 3.537.000,00	3.450.000,00
047	> 3.180.000,00 s/d 3.362.000,00	3.270.000,00
048	> 3.020.000,00 s/d 3.180.000,00	3.100.000,00
049	> 2.862.000,00 s/d 3.020.000,00	2.940.000,00
050	> 2.696.000,00 s/d 2.862.000,00	2.780.000,00

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )
051	> 2.554.000,00 s/d 2.696.000,00	2.625.000,00
052	> 2.384.000,00 s/d 2.554.000,00	2.470.000,00
053	> 2.261.000,00 s/d 2.384.000,00	2.320.000,00
054	> 2.100.000,00 s/d 2.261.000,00	2.200.000,00
055	> 1.975.000,00 s/d 2.100.000,00	2.050.000,00
056	> 1.885.000,00 s/d 1.975.000,00	1.950.000,00
057	> 1.781.000,00 s/d 1.885.000,00	1.833.000,00
058	> 1.675.000,00 s/d 1.781.000,00	1.730.000,00
059	> 1.568.000,00 s/d 1.675.000,00	1.620.000,00
060	> 1.464.000,00 s/d 1.568.000,00	1.516.000,00
061	> 1.359.000,00 s/d 1.464.000,00	1.410.000,00

062	> 1.239.000,00 s/d 1.359.000,00	1.300.000,00
063	> 1.161.000,00 s/d 1.239.000,00	1.200.000,00
064	> 1.041.000,00 s/d 1.161.000,00	1.100.000,00
065	> 993.000,00 s/d 1.041.000,00	1.020.000,00
066	> 943.000,00 s/d 993.000,00	968.000,00
067	> 895.000,00 s/d 943.000,00	920.000,00
068	> 844.000,00 s/d 895.000,00	870.000,00
069	> 802.000,00 s/d 844.000,00	823.000,00
070	> 753.000,00 s/d 802.000,00	780.000,00
071	> 718.000,00 s/d 753.000,00	730.000,00
072	> 682.000,00 s/d 718.000,00	700.000,00
073	> 647.000,00 s/d 682.000,00	660.000,00
074	> 610.000,00 s/d 647.000,00	630.000,00

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )
075	> 580.000,00 s/d 610.000,00	595.000,00
076	> 550.000,00 s/d 580.000,00	565.000,00
077	> 518.000,00 s/d 550.000,00	530.000,00
078	> 492.000,00 s/d 518.000,00	505.000,00
079	> 461.000,00 s/d 492.000,00	480.000,00
080	> 440.000,00 s/d 461.000,00	450.000,00
081	> 418.000,00 s/d 440.000,00	429.000,00

082	> 397.000,00 s/d 418.000,00	408.000,00
083	> 374.000,00 s/d 397.000,00	385.000,00
084	> 356.000,00 s/d 374.000,00	365.000,00
085	> 338.000,00 s/d 356.000,00	347.000,00
086	> 282.000,00 s/d 338.000,00	310.000,00
087	> 278.000,00 s/d 282.000,00	280.000,00
088	> 250.000,00 s/d 278.000,00	264.000,00
089	> 230.000,00 s/d 250.000,00	240.000,00
090	> 220.000,00 s/d 230.000,00	225.000,00
091	> 185.000,00 s/d 220.000,00	191.000,00
092	> 170.000,00 s/d 185.000,00	180.000,00
093	> 136.000,00 s/d 170.000,00	162.000,00
094	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
095	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
096	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
097	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
098	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )
099	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
100	> 0 s/d 52.000,00	50.000,00

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI